

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memainkan peran penting sebagai referensi dan landasan bagi penulis dalam melakukan penelitian baru. Dengan merujuk pada penelitian sebelumnya, penulis dapat memperluas dan memperkaya teori yang akan digunakan dalam mengkaji topik penelitian yang serupa. Selain itu, penelitian sebelumnya juga dapat membantu penulis untuk memahami konteks dan permasalahan yang telah diteliti sebelumnya, sehingga penelitian baru dapat lebih fokus dan relevan. Dengan mengintegrasikan temuan dari penelitian terdahulu, penelitian baru dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam memperluas pemahaman dan pengetahuan dalam bidang yang dipelajari. Table di bawah adalah beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema penelitian yang saya dapatkan dari berbagai jurnal dan skripsi, diantaranya :

Tabel Kajian Penelitian Terdahulu

Nama Penulis (Instansi)	Judul dan Tahun	Metode Penelitian	Fokus Peneliti	Temuan
Silaningsih dan Utami, (Universitas Djuanda Bogor, Jawa Barat, Indonesia)	Pengaruh marketing mix terhadap minat beli konsumen pada usaha Mikro kecil dan menengah (umkm) produk olahan makanan ringan (2018)	Metode penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan <i>survey</i>	Variabel yang diteliti adalah variabel (minat pembelian)	Berdasarkan hasil dari penelitian yang berpengaruh adalah produk dan terendah adalah promosi terhadap minat beli karena saran utama yang harus dilakukan Pihak UMKM adalah tetap membuat produk yang unik, memiliki kelebihan, dan menghasilkan produk berkualitas. Dengan demikian, konsumen akan merasa puas dengan produk tersebut dan akan bersedia mempromosikannya melalui metode "mouth to mouth" atau dari mulut ke mulut. Dengan adanya promosi yang dilakukan oleh konsumen yang puas, diharapkan UMKM dapat meningkatkan pangsa pasar dan mendapatkan lebih banyak pelanggan potensial pada makanan ringan. Kekurangannya adalah dari segi gencaran promosi produk.
Zebua, dkk (Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan)	Pengaruh harga dan kualitas produk terhadap minat beli	Data yang diambil menggunakan Metode analisis data yang	Variabel yang diteliti adalah variabel (Kualitas produk) dan variabel (Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap minat pembelian kripik singkong karena memiliki kelebihan dari

	Konsumen pada pt. Kreasi lutvi sejahtera (ukm keripik singkong) di tanjung morawa (2022)	menggunakan analisis deskriptif presentase, uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi berganda, uji hipotesis, uji detrminasi, uji f dsn uji t.	Minat beli)	segi bahan yang mudah ditemukan. Kekurangan dari kripik singkong ini adalah banyaknya pesaing hingga memproduksi kripik singkong.
Veranita, dkk (Universitas ARS ,Politeknik Pajajaran ICB ,Universitas Islam Nusantara)	Labelisasi Halal, Kualitas Produk dan Harga Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Produk-Produk UMKM Saffa Tjahya Lestari (2019)	Data yang diambil menggunakan metode kuantitatif deskriptif	Variabel (kualitas produk)	Membahas tentang Berdasarkan kualitas produk memiliki pengaruh terhadap proses keputusan pembelian produk Saffa sebagian besar responden dalam penelitian Tjahya Lestari menyatakan kepuasannya dalam membeli benda tersebut, terutama karena mereka menyukai mutu produk dan tampilannya. Kualitas produk dinilai cantik, higienis, dan sesuai, sehingga memungkinkan konsumen untuk membagikannya kepada saudara atau sebagai oleh-oleh. Kekurangannya adalah dari segi kesuaian harga dengan produk.

Yusril Nuris Tiantoro (Universitas Panca Marga)	Pengaruh Minat Beli dan Kualitas Produk UMKM Terhadap Peningkatan Pendapatan Olahan Regginang Ikan Tengiri Pada UD. Barokah Di Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigara Kota Probolinggo	Data yang diambil menggunakan Metode Penelitian Kuantitatif Asosiatif	Variabel X1 (Minat Beli), X2 (Kualitas Produk) Y (Peningkatan Pendapatan)	Hasil dari penelitian yang diperoleh maka variabel minat beli dan kualitas produk secara bersamaan atau simultan memiliki pengaruh terhadap peningkatan pendapatan. Dan secara tunggal atau Parsial minat beli dan kualitas Produk memiliki perhitungan yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan, serta yang berpengaruh dominan dalam penelitian yang dilakukan adalah variabel minat beli.
---	--	---	---	---

Sumber : penulis, 2023

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan antara signifikan minat beli, kualitas produk secara simultan terhadap peningkatan pendapatan pada UD. Barokah Kota Probolinggo, maka hasil menunjukkan bahwa nilai signifikan uji F $0,000 < 0,05$, maka hipotesis H_0 ditolak artinya menerima H_a , yaitu secara simultan variabel minat beli, kualitas produk secara simultan terhadap peningkatan pendapatan (Y).

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan minat beli, kualitas produk secara parsial terhadap peningkatan pendapatan UD. Barokah Kota Probolinggo, maka hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel minat beli $0,000 < 0,025$ yang artinya bahwa H_0 ditolak, artinya secara parsial minat beli (X_1) berpengaruh terhadap variabel peningkatan pendapatan (Y), berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel

kualitas Produk (X_2) $0,000 < 0,025$ yang artinya bahwa H_0 ditolak, artinya secara parsial kualitas produk (X_2) berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan.

Untuk mengetahui variabel manakah yang dominan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, maka hasil menunjukkan bahwa variabel minat beli (X_1) diperoleh nilai koefisien beta sebesar 1,701 dengan sig. 0,000, variabel kualitas produk (X_2) diperoleh nilai koefisien beta sebesar 0,419 dengan sig. 0,000,. Hal ini menunjukkan bahwa nilai koefisien minat beli (X_1) lebih besar dibanding kualitas produk (X_2), yang membuktikan bahwa variabel minat beli yang berpengaruh dominan terhadap peningkatan pendapatan.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 41,090, sedangkan nilai F tabel untuk tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan $V_1 = 3$ dan $V_2 = 95$ sebesar 2,46. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel ($41,090 > 2,46$), yang berarti hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Dengan tingkat kepercayaan 95%, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu produk (X_1), harga (X_2), tempat (X_3), dan promosi (X_4) berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap minat beli konsumen pada UMKM produk olahan makanan ringan di Kota Bogor (Y).

Berdasarkan hasil data yang diperoleh menurut Zebua dkk (2022), ditemukan bahwa angka R^2 (R Square) sebesar 0,107 atau 10,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa hanya 10,7% dari minat beli konsumen dapat dijelaskan oleh variabel harga dan kualitas produk yang diteliti dalam

penelitian ini. Sebanyak 89,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel yang diteliti. Ini menunjukkan bahwa terdapat variabel lain yang memiliki kontribusi yang signifikan dalam mempengaruhi minat beli konsumen selain harga dan kualitas produk.

Menurut Veranita, dkk (2019), Hasil penelitian dalam koefisien determinasi parsial variabel lebelisasi halal sebesar 46,80%, sedangkan kualitas produk memiliki koefisien determinasi parsial sebesar 13,50, dan harga memiliki koefisien determinasi parsial sebesar 39,70.

B. Kerangka Dasar Teori

a. Administrasi

Dr. Sondang Siagian (2012:13) menggambarkan administrasi sebagai proses kerja sama antara dua atau lebih individu yang didasarkan pada logika dan alasan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.. Secara keseluruhan, administrasi mencakup serangkaian kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan berbagai hal, dengan tujuan mencapai target yang telah ditetapkan. Sistem administrasi memiliki peran yang sangat penting dalam membantu perusahaan dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan operasionalnya.

Fungsi atau peran yang sangat penting dalam kegiatan sehari-hari:

1. Salah satu pandangan dari para ahli mengenai administrasi perkantoran menyatakan bahwa administrasi adalah kegiatan perencanaan. Oleh karena itu, fungsi administrasi yang pertama adalah perencanaan (planning), di mana dalam tahapan perencanaan

- ini melibatkan pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun rencana yang lebih baik.
2. Fungsi selanjutnya dalam administrasi perkantoran, menurut para ahli, adalah pengorganisasian (*organizing*). Fungsi ini melibatkan penyusunan dan pembentukan hubungan kerja antara berbagai pihak sehingga mencapai kesatuan dalam struktur dan tata kelola organisasi.
 3. Fungsi lain dari administrasi adalah pelaporan (*reporting*), di mana tugasnya adalah menyajikan laporan tentang perkembangan dan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan melalui penjelasan, baik secara lisan maupun tulisan. Dengan adanya fungsi pelaporan ini, pihak yang menerima laporan kegiatan dapat memperoleh informasi dan gambaran tentang pelaksanaan tugas yang telah dilakukan.
 4. Fungsi terakhir dari administrasi ini sebenarnya dapat dikategorikan dalam bidang administrasi keuangan. Fungsi tersebut adalah *budgeting*, yang bertujuan untuk mengelola dan mengatur segala perencanaan terkait anggaran atau keuangan yang digunakan. Meskipun termasuk dalam administrasi, namun fungsi administrasi keuangan lebih spesifik dalam mengatur aspek keuangan perusahaan. Secara dasar, definisi administrasi keuangan hampir sama dengan administrasi perkantoran, namun lebih fokus dalam fungsi mengatur keuangan.

Tujuan administrasi terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

1. Tujuan Umum: Tujuan umum dari administrasi adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan suatu organisasi. Administrasi bertujuan untuk menyelaraskan berbagai sumber daya dan kegiatan agar mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan.
2. Tujuan Khusus: Tujuan khusus dari administrasi adalah untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi. Tujuan khusus ini berkaitan dengan tujuan-tujuan spesifik dari setiap unit atau bagian dalam organisasi. Misalnya, tujuan khusus dari departemen penjualan bisa menjadi peningkatan penjualan sebesar 10% dalam satu tahun. Tujuan khusus ini mendukung pencapaian tujuan umum organisasi secara keseluruhan.

Administrasi yang di bahas meliputi :

- a. Menghimpun suatu kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan informasi atau data secara mendetail, kemudian menyimpannya untuk digunakan kembali jika dibutuhkan di masa mendatang.
- b. Melakukan pencatatan atau penulisan atau pengetikan data hasil kegiatan menghimpun informasi agar dapat disimpan, dibaca, atau dikirim.
- c. Melakukan pengelolaan dan analisis terhadap data administrasi yang telah dikumpulkan, baik yang sudah ada maupun yang baru dihimpun, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil atau informasi dari data tersebut.
- d. Melakukan penyimpanan dan pengamanan dokumen atau data dengan berbagai cara untuk mendokumentasikan informasi tersebut, sehingga dapat digunakan kembali ketika diperlukan di masa mendatang.

- e. Melakukan pengiriman data atau file ke pihak lain, baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi, dengan cara yang lebih baik dan efisien.

b. Hubungan Administrasi dengan Administrasi Publik

Menurut Woodrow Wilson, administrasi publik adalah urusan atau praktik pemerintahan dengan tujuan melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sesuai dengan keinginan rakyat; administrasi adalah serangkaian kegiatan yang mencakup pengaturan dan pengelolaan berbagai hal untuk mencapai tujuan tertentu..

Maka, hubungan antara administrasi dengan administrasi publik adalah bahwa keduanya merupakan pengelolaan segala hal untuk mencapai tujuan, baik itu dalam lingkup pemerintahan maupun kepentingan umum secara lebih luas. Administrasi publik fokus pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang efisien dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

c. Administrasi Publik

Administrasi publik memiliki tujuan untuk mengurus kepentingan masyarakat, penduduk, warganegara, dan rakyat dengan menerapkan berbagai disiplin birokrasi pemerintahan. Dalam administrasi publik, terjadi intervensi publik untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Ini merupakan ilmu sosial yang dinamis dan selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman, peradaban, dan teknologi. Perubahan tersebut dilakukan untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta memenuhi tuntutan kemajuan masyarakat.

Fokus administrasi publik adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Namun, dalam prakteknya, administrasi publik juga berfungsi sebagai pelayanan terhadap negara. Meskipun negara sejatinya ada untuk kepentingan masyarakat umum, konsep publik dalam administrasi publik dapat diartikan sebagai negara dalam sisi pelayanan terhadap masyarakat umum yang dilayani oleh pemerintah, selama tetap berlandaskan pada kaidah moral dan agama.

Dalam kajian administrasi publik, fokus utama adalah tiga elemen penting dalam suatu negara, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Administrasi publik berperan dalam mengaitkan ketiga elemen ini dengan berbagai peraturan dan kebijakan yang terkait dengan publik, tujuan negara, dan etika sebagai panduan bagi penyelenggara negara.

Lembaga legislatif berperan dalam pembuatan dan pengesahan undang-undang serta kebijakan-kebijakan publik. Lembaga eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dalam bentuk program-program pemerintahan. Sedangkan lembaga yudikatif memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa secara adil dan objektif.

Administrasi publik, menurut Keban, menggambarkan bagaimana pemerintah bertindak sebagai agen yang berkuasa atau regulator yang aktif dan proaktif dalam mengatur dan mengambil inisiatif. Masyarakat dianggap tidak bergerak, tidak memiliki kemampuan, dan diharapkan tunduk dan mengikuti keputusan yang dibuat oleh pemerintah..

Secara sederhana, administrasi publik adalah studi tentang pengelolaan organisasi publik. Meskipun kedua disiplin ini mempelajari tentang organisasi, administrasi publik dan ilmu manajemen memiliki perbedaan mendasar. Manajemen berfokus pada pengelolaan organisasi swasta yang berorientasi pada keuntungan, sementara administrasi publik berkaitan dengan organisasi publik atau pemerintah, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Kajian administrasi publik melibatkan berbagai aspek, seperti struktur birokrasi, perumusan kebijakan publik, implementasi kebijakan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Disiplin ini juga mencakup administrasi pembangunan, pemerintahan daerah, dan konsep Good Governance.

Unsur-unsur dalam administrasi publik adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Legislatif: Merupakan bagian dari pemerintahan yang bertanggung jawab dalam membuat undang-undang atau kebijakan publik. Lembaga legislatif biasanya berfungsi sebagai wakil rakyat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
2. Lembaga Eksekutif: Merupakan bagian dari pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan publik dan program-program pemerintah. Lembaga eksekutif dipimpin oleh kepala negara atau kepala pemerintahan, seperti presiden, perdana menteri, atau gubernur.
3. Lembaga Yudikatif: Merupakan bagian dari pemerintahan yang berperan dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa hukum.

Lembaga yudikatif terdiri dari berbagai tingkatan pengadilan, mulai dari tingkat daerah hingga tingkat nasional.

4. Kebijakan Publik: Merupakan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kebijakan publik dapat mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
5. Birokrasi: Merupakan struktur organisasi pemerintahan yang melaksanakan tugas-tugas administratif dan operasional. Birokrasi bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan publik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Penyusunan Kebijakan: Proses pembuatan kebijakan publik, yang melibatkan identifikasi masalah, analisis kebutuhan, pengumpulan data, serta pemilihan alternatif solusi untuk mencapai tujuan tertentu.
7. Implementasi Kebijakan: Proses penerapan dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Implementasi melibatkan berbagai tahap, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
8. Evaluasi Kebijakan: Proses penilaian terhadap hasil dan dampak dari pelaksanaan kebijakan publik. Evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kebijakan serta mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan.
9. Administrasi Pembangunan: Merupakan bagian dari administrasi publik yang fokus pada perencanaan dan pelaksanaan program-program

pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur.

10. Good Governance: Konsep tata pemerintahan yang baik, yang mencakup aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan penegakan hukum yang adil. Good governance bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, responsif, dan melayani kepentingan masyarakat dengan baik.

Fungsi administrasi publik adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan: Merupakan fungsi untuk merumuskan tujuan dan strategi dalam mencapai tujuan organisasi publik. Perencanaan melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis kebutuhan, dan penentuan langkah-langkah yang akan diambil.
2. Pengorganisasian: Fungsi ini berfokus pada pembentukan struktur organisasi, penentuan tugas dan tanggung jawab, serta pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi publik.
3. Pelaksanaan: Fungsi ini melibatkan tindakan nyata untuk menjalankan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Pelaksanaan mencakup proses implementasi, koordinasi, dan pengaturan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Pengawasan: Fungsi pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang telah ditetapkan dijalankan dengan baik dan sesuai dengan peraturan dan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan

juga berfungsi untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan umpan balik untuk perbaikan.

5. **Evaluasi:** Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi hasil dan dampak dari kebijakan dan program yang telah dijalankan. Evaluasi bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi program, serta mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan.
6. **Pemberdayaan Masyarakat:** Administrasi publik juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu melibatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan.
7. **Penyediaan Pelayanan Publik:** Fungsi administrasi publik juga mencakup penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini termasuk pelayanan dalam bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik lainnya.
8. **Kebijakan Publik:** Administrasi publik berperan dalam merumuskan kebijakan publik yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Kebijakan publik dapat mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik.
9. **Penanganan Masalah Sosial:** Administrasi publik juga berperan dalam menangani masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini

termasuk penanganan kemiskinan, pengangguran, bencana alam, dan masalah-masalah sosial lainnya.

10. Diplomasi dan Hubungan Internasional: Fungsi administrasi publik juga mencakup diplomasi dan hubungan internasional, yaitu melakukan kerjasama dengan negara-negara lain dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, politik, budaya, dan lingkungan.

Administrasi Publik mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

- Memastikan keamanan publik dengan baik adalah salah satu tugas penting dari pemerintah dalam administrasi publik. Keamanan publik mencakup berbagai aspek, termasuk keamanan fisik, keamanan sosial, keamanan ekonomi, dan keamanan cyber. Memastikan kesejahteraan publik secara merata
- Memastikan untuk bersikap adil bagi seluruh warga negara tanpa melihat suatu apapun adalah salah satu prinsip penting dalam administrasi publik. Prinsip ini menekankan bahwa setiap warga negarnya harus diperlakukan secara sama dan setara, tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi, etnis, agama, jenis kelamin, atau status lainnya.

Untuk mencapai tujuan administrasi publik, beberapa hal yang diperlukan antara lain:

1. Keterbukaan dan Transparansi: Lembaga pemerintahan harus beroperasi secara terbuka dan transparan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Informasi mengenai kebijakan

publik dan penggunaan anggaran harus mudah diakses oleh masyarakat.

2. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat harus diberdayakan dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi aktif dari masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan keberlanjutan kebijakan yang diimplementasikan.
3. Efisiensi dan Efektivitas: Administrasi publik harus berusaha untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penggunaan sumber daya harus optimal dan hasil yang dicapai harus sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
4. Profesionalisme dan Etika: Pegawai pemerintahan harus memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Mereka juga harus mengedepankan etika dan integritas dalam melaksanakan tugas pelayanan publik.
5. Responsivitas dan Inklusivitas: Administrasi publik harus responsif terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, pelayanan publik harus inklusif dan tidak diskriminatif terhadap semua lapisan masyarakat.
6. Pengawasan dan Akuntabilitas: Ada mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan tindakan pemerintah sesuai dengan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat juga harus dijamin.

7. Inovasi dan Pengembangan Kapasitas: Administrasi publik harus mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengembangan kapasitas pegawai pemerintah untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang.

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut, administrasi publik dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan adil bagi masyarakat serta menciptakan keamanan dan kesejahteraan yang lebih baik..

Dari penjelasan sebelumnya, kita memahami bahwa administrasi publik memiliki peran penting dalam menentukan tujuan pembangunan dan merumuskan strategi untuk mencapainya, terutama yang berfokus pada pelayanan umum bagi seluruh warga negara Indonesia. Administrasi publik berperan sebagai pengatur dan penyelenggara berbagai kegiatan pemerintahan yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dan mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam konteks ini, administrasi publik memainkan peran strategis dalam merumuskan kebijakan dan program yang berhubungan dengan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan lainnya. Tujuan dari pelayanan publik ini adalah untuk memberikan manfaat yang merata dan menyeluruh bagi seluruh warga negara, tanpa memandang perbedaan sosial, ekonomi, atau geografis.

Administrasi publik juga bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik dengan efisien dan efektif, sehingga pelayanan publik dapat

berjalan dengan lancar dan optimal. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya, administrasi publik juga harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan integritas agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga. Dengan cara ini, administrasi publik dapat berkontribusi secara signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas bagi semua warga negara Indonesia.

Pengertian dari Manajemen Publik menurut beberapa sumber ialah:

Pengertian manajemen publik menurut para ahli bervariasi tergantung pada sudut pandang dan latar belakang pendidikan mereka. Beberapa pengertian manajemen publik yang dapat disebutkan adalah sebagai berikut:

Nor Ghofur (2014) menyatakan bahwa, manajemen publik dapat diartikan sebagai manajemen pemerintah, yang berarti bahwa manajemen publik juga bertujuan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian terhadap pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam konteks ini, manajemen publik berfokus pada pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang efisien dan efektif. Hal ini melibatkan proses perumusan dan implementasi kebijakan, pengelolaan sumber daya publik, serta pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Lain halnya dengan Shafritz dan Russel (dalam Keab, 2008:93) yang menyatakan bahwa, manajemen publik adalah suatu usaha atau upaya perorangan yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengoperasikan suatu kelompok atau entitas publik. Tujuan dari manajemen publik ini adalah untuk pemanfaatan sumber daya yang ada, baik berupa tenaga kerja maupun peralatan, secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan kelompok tersebut. Dalam konteks ini, manajemen publik mencakup merencanakan, mengkoorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya publik untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan program dan kebijakan pemerintah. Tujuan utama dari manajemen publik adalah untuk mencapai hasil yang diharapkan dengan memastikan bahwa sumber daya yang ada dimanfaatkan dengan baik dan tepat guna.

a. Pengertian Manajemen

Pengertian Manajemen adalah suatu tahapan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya manusia serta sumber daya lainnya dalam suatu organisasi. Tujuan dari manajemen adalah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen juga melibatkan pengambilan keputusan, pengaturan proses kerja, dan pengelolaan semua aspek yang terkait dengan operasional organisasi.

Dalam organisasi, manajemen memiliki peran krusial dalam mengatur dan menyelenggarakan proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Khususnya dalam instansi pemerintah, terutama yang berhubungan dengan

pelayanan publik, manajemen yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses pelayanan berjalan dengan baik dan mencapai kepuasan masyarakat. Tujuan utama dari pelayanan publik adalah memastikan kepuasan masyarakat, dan manajemen yang baik membantu memastikan bahwa sumber daya dan proses diorganisasi dengan baik agar pelayanan dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan manajemen yang tepat, instansi pemerintah dapat mencapai hasil yang diinginkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Menurut Manulang (Atik & Ratminto, 2012:1), manajemen adalah gabungan antara seni dan ilmu dalam merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, menyusun, dan mengawasi penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Stoner dan Freeman (dalam Safroni, 2012:44), manajemen merupakan suatu proses yang mencakup beberapa langkah, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, yang dilakukan untuk mengarahkan upaya para anggota organisasi dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

b. Fungsi-Fungsi Manajemen Publik

Fungsi manajemen publik adalah bagian dasar yang melekat dalam proses manajemen dan menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi-fungsi manajemen publik meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengarahan, pengendalian, dan

pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi atau instansi publik. Dengan mengimplementasikan fungsi-fungsi tersebut dengan baik, manajemen publik dapat efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan mencapai kepuasan masyarakat.

Menurut Henry Fayol, fungsi-fungsi manajemen tersebut memiliki arti dan peran masing-masing dalam proses manajemen:

1. Perencanaan (planning): Merupakan tahap awal dalam manajemen yang melibatkan penetapan tujuan, strategi, dan tahap-tahap yang akan diambil untuk mencapainya.
2. Pengorganisasian (organizing): Melibatkan pembagian tugas, pengelompokan aktivitas, dan penentuan struktur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Pengarahan (commanding): Mencakup pemberian petunjuk, arahan, dan motivasi kepada bawahan agar melaksanakan tugas sesuai dengan perencanaan.
4. Pengkoordinasian (coordinating): Mengatur dan mengintegrasikan berbagai aktivitas, kelompok, atau bagian organisasi agar dapat bekerja secara sinergis dan saling mendukung.
5. Pengendalian (controlling): Melibatkan pemantauan, evaluasi, dan koreksi terhadap pelaksanaan rencana untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan efisien dan efektif.

Jadi, fungsi-fungsi manajemen ini merupakan elemen-elemen dasar yang saling terkait dan perlu dilaksanakan secara terpadu untuk mencapai tujuan organisasi dengan baik.

Pengkoordinasian memainkan peran yang sangat penting dalam suatu organisasi, dan ada beberapa alasan mengapa pengkoordinasian menjadi sangat penting:

1. **Mencapai Tujuan Bersama:** Pengkoordinasian memastikan bahwa semua tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh individu karyawan atau bagian-bagian dalam organisasi berjalan sejalan dengan tujuan keseluruhan perusahaan. Dengan adanya pengkoordinasian, setiap kegiatan dan usaha dapat dikaitkan dengan tujuan strategis organisasi, sehingga keseluruhan organisasi dapat mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.
2. **Mencegah Tumpang Tindih dan Konflik:** Tanpa pengkoordinasian, ada risiko tumpang tindih tugas dan tanggung jawab antara berbagai bagian dalam organisasi. Ini dapat menyebabkan kebingungan, ketidakjelasan, dan bahkan konflik di antara karyawan atau bagian-bagian yang terlibat. Pengkoordinasian membantu menghindari tumpang tindih dan mengatasi konflik potensial dengan menetapkan batasan tugas dan tanggung jawab dengan jelas.
3. **Optimalisasi Sumber Daya:** Pengkoordinasian memungkinkan penggunaan sumber daya secara optimal di seluruh organisasi. Dengan saling berkoordinasi, organisasi dapat menghindari pemborosan

sumber daya dan memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan dengan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

4. Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas: Dengan adanya pengkoordinasian, proses kerja menjadi lebih terstruktur dan efisien. Karyawan dapat berkomunikasi dengan lebih baik, berbagi informasi, dan bekerja secara sinergis untuk mencapai hasil yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan.
5. Adaptasi terhadap Perubahan: Dalam lingkungan bisnis yang terus berubah, pengkoordinasian menjadi kunci untuk memastikan bahwa organisasi dapat beradaptasi dengan cepat dan efektif terhadap perubahan dalam pasar, teknologi, atau lingkungan bisnis. Dengan adanya koordinasi, organisasi dapat dengan cepat menyesuaikan strategi dan taktiknya untuk tetap relevan dan kompetitif.

Dalam rangka mencapai keberhasilan dan keberlanjutan, pengkoordinasian menjadi fondasi yang kuat dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan organisasi.

d. Paradigma Administrasi Publik

Paradigma administrasi publik merupakan sebuah konsep yang mencerminkan perubahan, perkembangan, dan perspektif baru terhadap model dan teori administrasi publik. Seiring dengan waktu, ilmu administrasi publik mengalami perkembangan dan perubahan paradigma yang menggambarkan evolusi dan kemajuan dalam pemahaman dan pendekatan terhadap administrasi publik.

Perkembangan suatu ilmu dapat ditinjau dari perubahan paradigma yang terjadi di dalamnya. Paradigma merupakan landasan atau kerangka pemikiran yang menjadi dasar dalam mengkaji suatu bidang ilmu. Ketika paradigma berubah, maka cara pandang dan pendekatan dalam ilmu tersebut juga mengalami perubahan.

Pelayanan publik sangat tergantung pada situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Hal ini disebabkan karena masyarakat dan politik merupakan dua hal yang sangat dinamis dan selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu, administrasi publik harus senantiasa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat dan politik untuk memberikan pelayanan yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan publik.

Dalam menghadapi perubahan dan dinamika tersebut, paradigma administrasi publik juga mengalami transformasi agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan zaman. Perubahan paradigma ini mencerminkan upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik serta mengikuti perkembangan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara dinamis.

Perubahan Paradigma menurut Nicholas Henry

1. Paradigma Politik Administrasi (tahun 1900-1926) Berawal dari tulisan Frank J. Goodnow dan Lenald D. White dalam bukunya *Politics and Administration* menjadi awal nuansa penyelenggaraan administrasi dikotomi politik. Goodnow berpendapat bahwa ada dua fungsi pokok pemerintah yang amat berbeda satu sama lain. Fungsi politik dan

administrasi sebagai tertulis dalam buku tersebut. Politik menurut Goodnow harus memuat kebijaksanaan kebijaksanaan atau melahirkan keinginan negara, sedangkan administrasi dimaknai hal yang harus berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Penekan paradigm pertama ini lebih kepada locusnya yakni permasalahan dimana seharusnya administrasi berada.

Meskipun badan eksekutif dan legislatif melakukan tugas administrasi mereka sendiri, fungsi utama dan kewajiban posisi administrasi adalah memenuhi tujuan negara. Paradigma pertama dalam studi administrasi publik mendapat perhatian besar dari akademisi dan praktisi, terutama karena adanya dikotomi antara politik dan administrasi, serta berkat gerakan pelayanan masyarakat umum yang dikenal dengan sebutan "public service movement". Pada tahun 1920-an, administrasi mulai mendapatkan legitimasi akademis dan pada tahun 1926, Leonal White menerbitkan karyanya yang berjudul "Introduction to The Study of Public Administration". Buku tersebut dianggap sebagai inti dari karakter administrasi Amerika yang mendorong perbedaan antara administrasi dan politik.

Dwight Waldo menyatakan bahwa buku Leonal White menjadi dasar bagi perkembangan administrasi publik di Amerika. Melalui karyanya, White menegaskan pentingnya membedakan antara administrasi, yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik, dengan politik, yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan dan

pengambilan keputusan politik. Dikotomi ini menjadi prinsip utama dalam studi administrasi publik pada masa itu.

Dengan adanya perbedaan antara administrasi dan politik, administrasi publik diharapkan dapat menjadi lebih profesional dan efisien dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Administrasi publik dianggap sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang berkualitas tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu.

Namun, paradigma pertama ini juga mendapatkan kritik karena dianggap terlalu sempit dan terlalu mengabaikan hubungan yang kompleks antara administrasi dan politik. Beberapa kritikus menyatakan bahwa administrasi publik tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari politik karena pelaksanaan kebijakan publik selalu berhubungan dengan proses politik yang lebih luas.

Seiring berjalannya waktu, paradigma pertama ini mengalami perkembangan dan evolusi. Studi administrasi publik semakin meluas dan mempertimbangkan hubungan yang lebih kompleks antara administrasi dan politik, serta peran administrasi dalam konteks pemerintahan dan masyarakat yang lebih luas

2. Periode paradigma prinsip-prinsip administrasi publik tahun 1927-1937 adalah masa penting dalam perkembangan ilmu administrasi publik yang dipelopori oleh W.F. Willoughby. Paradigma ini menekankan pada penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam administrasi publik.

Beberapa prinsip utama yang diperkenalkan oleh W.F. Willoughby dalam periode ini antara lain:

- a. Prinsip Efisiensi: Menekankan pada penggunaan sumber daya yang efisien, termasuk sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas, untuk mencapai tujuan pemerintahan dengan biaya dan waktu yang minimal.
- b. Prinsip Spesialisasi: Memisahkan tugas dan pekerjaan berdasarkan keahlian dan kemampuan individu, sehingga setiap pekerjaan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.
- c. Prinsip Hierarki: Menyusun struktur organisasi berdasarkan tingkatan otoritas dan tanggung jawab, sehingga ada arus komunikasi dan pengambilan keputusan yang jelas.
- d. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan: Menjamin pelayanan publik yang adil dan merata bagi seluruh warga masyarakat tanpa diskriminasi.
- e. Prinsip Administrasi Sistematis: Mengedepankan pendekatan yang sistematis dan terencana dalam mengelola administrasi publik, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.
- f. Prinsip Tanggung Jawab dan Akuntabilitas: Menekankan pentingnya tanggung jawab dan akuntabilitas para pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya.

Paradigma prinsip-prinsip administrasi publik ini memberikan landasan penting bagi pengembangan ilmu administrasi publik di masa-masa berikutnya. Meskipun demikian, paradigma ini juga mengalami perubahan dan pengembangan lebih lanjut seiring

dengan perubahan dan kompleksitas tantangan di dalam administrasi publik.

3. Periode paradigma ilmu politik administrasi antara tahun 1950 hingga 1970 merupakan masa perkembangan yang signifikan dalam studi tentang administrasi publik. Pada periode ini, terjadi pergeseran fokus dari prinsip-prinsip manajemen menuju aspek-aspek politik yang mempengaruhi administrasi publik. Beberapa ciri utama dari paradigma ini antara lain:
 - a. Pendekatan Politik: Pada periode ini, penelitian tentang administrasi publik tidak hanya memperhatikan aspek manajemen internal, tetapi juga mengkaji pengaruh politik dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
 - b. Studi tentang Kebijakan Publik: Paradigma ini menekankan pada studi tentang kebijakan publik, termasuk analisis kebijakan, implementasi, dan dampaknya terhadap masyarakat.
 - c. Partisipasi Masyarakat: Periode ini menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Masyarakat dianggap sebagai pihak yang aktif dan memiliki peran dalam mengelola urusan pemerintahan.
 - d. Kritik terhadap Birokrasi: Paradigma ini juga menaruh perhatian pada kritik terhadap birokrasi, termasuk masalah korupsi, nepotisme, dan ketidakefisienan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- e. Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Dalam periode ini, muncul perhatian terhadap pentingnya desentralisasi dan otonomi daerah sebagai upaya untuk memberdayakan wilayah-wilayah dan daerah dalam mengelola pelayanan publik.
- f. Peran Negara dalam Pembangunan: Paradigma ini juga mengkaji peran negara dalam pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan.

Periode ini memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan ilmu politik administrasi dan menciptakan kesadaran tentang kompleksitas dan dinamika administrasi publik. Paradigma ini juga memberi dasar bagi pengembangan ilmu administrasi publik menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan zaman.

- 4. Periode paradigma administrasi publik sebagai ilmu administrasi antara tahun 1956 hingga 1970 adalah masa penting dalam pengembangan ilmu administrasi publik sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri dan berdiri sendiri. Pada periode ini, paradigma ini menekankan pada pengembangan teori dan metode administrasi publik yang lebih sistematis dan ilmiah. Beberapa ciri utama dari paradigma ini antara lain:
 - a. Pencarian Identitas Ilmu Administrasi: Periode ini merupakan upaya untuk mendefinisikan identitas ilmu administrasi publik

sebagai disiplin ilmu yang berbeda dengan ilmu-ilmu lain, seperti ilmu politik dan ilmu manajemen. Paradigma ini mencari landasan teoritis dan metodologis yang khas untuk administrasi publik.

- b. Pengembangan Teori Administrasi Publik: Paradigma ini menitikberatkan pada pengembangan teori administrasi publik sebagai landasan untuk memahami prinsip-prinsip, proses, dan praktik administrasi publik. Beberapa tokoh penting dalam pengembangan teori administrasi publik pada periode ini adalah Herbert Simon dan Dwight Waldo.
- c. Penekanan pada Efisiensi dan Efektivitas: Paradigma ini juga menekankan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Administrasi publik dianggap harus berorientasi pada pencapaian tujuan dengan cara yang efisien dan efektif.
- d. Penggunaan Metode Ilmiah: Periode ini juga menekankan pada penggunaan metode ilmiah dalam studi administrasi publik, termasuk metode penelitian empiris, analisis data, dan pengembangan model analisis.
- e. Peran Profesional Administrasi Publik: Paradigma ini juga memperkuat peran profesional administrasi publik dalam mengelola pelayanan publik. Administrasi publik dianggap sebagai disiplin ilmu yang relevan untuk mempersiapkan para profesional yang kompeten dalam bidang administrasi pemerintahan.

Periode ini memberikan sumbangan besar dalam mengembangkan ilmu administrasi publik sebagai disiplin ilmu yang mapan dan mandiri. Paradigma ini menciptakan landasan teoritis dan metodologis yang kuat untuk pengembangan studi administrasi publik, dan memperkuat identitas administrasi publik sebagai disiplin ilmu yang memiliki peran strategis dalam pemerintahan dan pelayanan public.

5. Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik pada tahun 1970 menciptakan kekacauan intelektual tentang penggunaan istilah keilmuan dan prinsip administrasi. Pada titik ini, bidang administrasi publik dianggap tidak hanya sebagai bidang administrasi murni, tetapi juga dihubungkan dengan teori organisasi. Dalam dua dekade terakhir, teori organisasi telah menjadi subjek utama perhatian, terutama dalam upaya untuk memahami bagaimana organisasi beroperasi dan membuat keputusan..

Dalam teori organisasi, elemen yang dibahas dianggap sebagai rantai yang menghubungkan fokus administrasi negara dengan tempatnya dalam analisis kebijakan publik. Dalam hal ini, fokus administrasi negara diarahkan pada teori organisasi, sementara penerapannya berkaitan dengan analisis kebijakan publik.

Paradigma ini mengakui pentingnya teori organisasi dalam memahami dan mengelola administrasi publik. Teori organisasi memberikan wawasan tentang bagaimana organisasi beroperasi,

mengambil keputusan, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dengan demikian, paradigma ini mencoba untuk mengintegrasikan konsep dan prinsip dari teori organisasi ke dalam studi administrasi publik, sehingga dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan kontekstual tentang bagaimana administrasi publik berfungsi dalam praktiknya.

Old Public Administration Gerakan perubahan yang dimulai oleh Woodrow Wilson adalah paradigma lama administrasi publik (OPA), juga dikenal sebagai Administrasi Publik Klasik atau Administrasi Publik Lama. Wilson berpendapat bahwa administrasi publik harus terpisah dari dunia politik. Paradigma ini berkonsentrasi pada organisasi, staf, dan penyusunan anggaran dalam birokrasi dan pemerintahan. Politik dan kebijakan adalah bagian dari ilmu politik, tetapi administrasi publik adalah bagian dari ilmu politik..

Saat ini, ada perbedaan yang jelas antara pemerintahan negara dan politik. Buku "Politik dan Administrasi" oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White mendukung paradigma ini dengan menyatakan bahwa politik dan administrasi adalah dua fungsi utama pemerintah. Menurut Goodnow, administrasi publik harus berpusat pada birokrasi pemerintah. Dalam paradigma OPA ini, administrasi publik dianggap sebagai ilmu yang berfokus pada pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi. Administrasi publik harus bebas dari campur tangan politik dan hanya fokus pada efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas-

tugas administratif. Pemisahan tugas dan fungsi ini dianggap penting untuk mencapai tujuan pelayanan publik dengan baik.

Kelebihan dari paradigma Old Public Administration (OPA) adalah sebagai berikut:

- a. Gaji dan tunjangan kerja: OPA menitik beratkan pada sistem penggajian yang jelas dan tunjangan kerja yang sesuai untuk pegawai pemerintah, sehingga memberikan insentif bagi kinerja yang baik.
- b. Kebijakan terpusat dan tujuan tunggal: Dalam OPA, kebijakan pemerintah diarahkan secara terpusat dan fokus pada satu tujuan tunggal. Hal ini dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan konsisten.
- c. Struktur tersusun secara hierarki: OPA mengadopsi struktur hierarki yang jelas dalam organisasi pemerintah, sehingga memberikan arah dan wewenang yang jelas bagi para pegawai pemerintah.

Namun, OPA juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

- a. Sesuatu yang diterjemahkan secara politis dan tercantum dalam aturan: OPA cenderung memisahkan antara administrasi dan politik, sehingga keputusan administratif sering kali dibatasi oleh aturan dan prosedur yang kaku.
- b. Diskresi kebijakan terbatas: Karena OPA lebih berfokus pada kepatuhan terhadap aturan, pegawai pemerintah memiliki

keterbatasan dalam menggunakan diskresi dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

- c. Sistemnya kaku: OPA sering kali dianggap kaku dan sulit beradaptasi dengan perubahan dan dinamika yang cepat dalam lingkungan pelayanan publik. Hal ini dapat menghambat inovasi dan pengembangan pelayanan yang lebih efektif.

New Public Administration merupakan suatu pendekatan baru dalam administrasi publik yang fokus pada upaya untuk mengorganisasi dan mendesain organisasi pemerintahan dengan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal. Tujuannya adalah menciptakan sistem desentralisasi dan organisasi-organisasi demokratis yang responsif serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. New Public Administration juga berupaya memberikan pelayanan yang merata dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif.

Menurut Fredericson, munculnya New Public Administration dipicu oleh berbagai krisis yang melanda dunia. Krisis-krisis ini memberikan pengaruh signifikan terhadap negara-negara di seluruh dunia, termasuk dalam konteks administrasi publik. Krisis tersebut bisa berupa krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, atau krisis lainnya. Akibat dari krisis-krisis ini, paradigma lama dalam administrasi publik dianggap tidak lagi memadai untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan.

Sebagai respons terhadap krisis-krisis tersebut, muncul pendekatan baru yaitu New Public Administration, yang menekankan pada inovasi dan perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Paradigma ini menempatkan pemerintahan sebagai pelayan masyarakat dan menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, New Public Administration mencoba untuk mencari solusi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Kelebihan dari New Public Administration (NPA) adalah peningkatan mutu dan ukuran kinerja birokrasi. Dengan pendekatan yang lebih responsif dan partisipatif, NPA dapat menghasilkan perubahan yang positif dalam cara pemerintah mengelola dan menyediakan pelayanan publik. Beberapa kelebihan NPA antara lain:

- a. Peningkatan Mutu Pelayanan: NPA berfokus pada kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama. Dengan mengedepankan partisipasi dan responsivitas, pelayanan publik dapat ditingkatkan dalam hal mutu dan ketepatan waktu, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih besar.
- b. Efisiensi dan Efektivitas: Melalui desentralisasi dan partisipasi masyarakat, NPA dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengurangi

birokrasi yang rumit dan memungkinkan penyesuaian yang lebih cepat terhadap perubahan dan tantangan.

- c. Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat: NPA menekankan pada pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan dan program yang dihasilkan lebih sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat.

Namun, ada juga beberapa kekurangan dari pendekatan NPA, di antaranya:

- a. Keterbatasan Peran Pemerintah: Dalam NPA, pemerintah menjadi lebih mengarahkan dan mendorong partisipasi masyarakat, tetapi kurang terlibat secara langsung dalam menangani permasalahan publik. Hal ini bisa menyebabkan ketidakefektifan dalam mengatasi masalah yang memerlukan campur tangan langsung dari pemerintah.
- b. Tantangan Implementasi: Mengubah paradigma administrasi publik menjadi lebih partisipatif dan responsif adalah tugas yang kompleks. Implementasi NPA dapat menghadapi hambatan dan tantangan dari birokrasi yang sudah mapan dan kepentingan-kepentingan yang sudah ada.
- c. Kekurangan Sumber Daya: NPA mengandalkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan sumber daya dan dukungan. Namun, dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin tidak memiliki kapasitas atau sumber daya yang cukup untuk mengambil peran aktif dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Meskipun demikian, pendekatan NPA tetap memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan kualitas dan responsivitas pelayanan publik, serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Paradigma New Public Management (NPM) atau "Reinventing Government" adalah pendekatan yang bersifat reformatif dalam administrasi publik. Paradigma ini digagas oleh David Osborne dan Ted Gaebler dalam buku mereka yang berjudul "Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector" pada tahun 1992. NPM berfokus pada upaya untuk merombak sistem birokrasi pemerintahan tradisional dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada manajemen dan kinerja seperti yang terjadi dalam sektor swasta. Beberapa ciri dari paradigma NPM adalah:

- a. Manajemen Berbasis Hasil: NPM menekankan pada pengukuran kinerja dan pencapaian hasil yang konkret. Organisasi pemerintahan diarahkan untuk mencapai sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan efisien dan efektif.
- b. Desentralisasi dan Fleksibilitas: NPM mendorong desentralisasi keputusan dan pemberian kewenangan kepada tingkat yang lebih rendah dalam pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan dalam menghadapi perubahan dan tantangan.

- c. Pemakaian Prinsip Bisnis: NPM mengadopsi beberapa prinsip dan praktik dari dunia bisnis, seperti manajemen berbasis kinerja, penghematan biaya, kompetisi, dan insentif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.
- d. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat: Paradigma NPM mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Masyarakat dianggap sebagai mitra penting dalam menyusun dan melaksanakan program pemerintah.
- e. Kompetisi Antar-Unit Pemerintah: NPM mengadopsi prinsip persaingan antar-unit pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik. Hal ini diharapkan akan memotivasi unit-unit pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisien.

Namun, paradigma NPM juga menghadapi kritik dan tantangan, seperti peran yang semakin besar dari sektor swasta dalam penyediaan layanan publik, kemungkinan pengabaian aspek keadilan dan keberlanjutan, serta risiko mengabaikan tujuan-tujuan sosial dan kemanusiaan. Meskipun begitu, paradigma NPM tetap berpengaruh dalam upaya reformasi administrasi publik di berbagai negara.

Paradigma New Public Service (NPS) merupakan pendekatan yang berbeda dengan paradigma New Public Management (NPM). NPS menolak konsep bisnis dan orientasi pada keuntungan yang diterapkan dalam NPM, dan justru menekankan pentingnya pelayanan publik yang berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.

Paradigma ini lebih mengutamakan pelayanan yang berfokus pada kepentingan rakyat dan bukan pada persaingan dan pelanggan seperti di sektor swasta.

Paradigma The New Public Service (NPS) merupakan pandangan yang menempatkan birokrasi sebagai alat untuk melayani kepentingan rakyat dan tunduk pada suara rakyat yang rasional dan sesuai dengan norma dan konstitusi. Pimpinan dalam birokrasi tidak hanya dianggap sebagai makhluk ekonomi seperti dalam konsep New Public Management, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan politik serta bertugas sebagai pelayan publik.

Konsep NPS bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang demokratis dengan mengutamakan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan tata pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, konsep ini memerlukan keberanian dan kerelaan dari aparatur pemerintahan untuk mempengaruhi dan mengubah sistem yang sudah berlaku. Hal ini karena paradigma NPS menekankan pentingnya mendengarkan suara publik dan melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan, tanpa ada yang hanya menjadi penonton.

Meskipun pelaksanaan konsep NPS tidak mudah, terutama bagi pemerintah yang sebelumnya bersikap sewenang-wenang terhadap publik, namun paradigma ini menawarkan alternatif yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan menerapkan konsep NPS, diharapkan pemerintah dapat lebih dekat dengan masyarakat dan

memastikan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih sesuai dengan aspirasi rakyat.

Paradigma baru layanan publik terdiri dari ide-ide yang sangat relevan dengan prinsip-prinsip masyarakat saat ini. Pemerintah bertugas menggabungkan nilai-nilai yang ada sehingga sesuai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sistem nilai masyarakat berubah, jadi pemerintah harus memberikan layanan terbaik.

Ada beberapa prinsip yang ditawarkan oleh Denhart & Denhart (2003) dalam konsep New Public Service (NPS) adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan kepada Masyarakat: Prinsip ini menekankan pentingnya fokus pada kepentingan masyarakat dan pelayanan yang berkualitas. Birokrasi diarahkan untuk menjadi pelayan publik yang setia dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- b. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat: Prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Partisipasi aktif masyarakat dianggap penting untuk mencapai kebijakan yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan rakyat.
- c. Etika dan Moralitas: Prinsip ini menekankan pentingnya integritas dan moralitas dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Birokrasi diharapkan bekerja dengan penuh integritas, jujur, dan beretika tinggi dalam mengelola sumber daya publik.

- d. Kepentingan Umum: Prinsip ini menekankan bahwa tindakan dan kebijakan pemerintah haruslah mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individu atau kelompok tertentu.
- e. Kolaborasi dan Kemitraan: Prinsip ini menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mencapai tujuan bersama. Kolaborasi dan kemitraan dianggap dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya dan mencapai hasil yang lebih baik.
- f. Pembelajaran dan Inovasi: Prinsip ini menekankan pentingnya belajar dari pengalaman dan terus berinovasi dalam menjalankan pelayanan publik. Birokrasi diharapkan menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan dan tantangan yang terjadi.

Prinsip-prinsip ini merupakan panduan bagi pemerintah dan aparatur publik dalam menerapkan konsep New Public Service, dengan tujuan agar pelayanan publik menjadi lebih baik, demokratis, dan responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Berikut adalah sepuluh dimensi pengukuran keberhasilan penerapan New Public Service:

- a. Kepuasan Masyarakat: Mengukur sejauh mana pelayanan publik memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat serta tingkat kepuasan yang diberikan kepada masyarakat.
- b. Partisipasi Masyarakat: Mengukur sejauh mana masyarakat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik.

- c. **Transparansi:** Mengukur sejauh mana pemerintah memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan dapat diakses oleh masyarakat terkait kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik.
- d. **Akuntabilitas:** Mengukur sejauh mana pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambil serta melaksanakan tanggung jawabnya dengan tepat waktu.
- e. **Efisiensi:** Mengukur sejauh mana pemerintah mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan optimal.
- f. **Efektivitas:** Mengukur sejauh mana hasil yang diharapkan dari pelayanan publik dicapai dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- g. **Responsivitas:** Mengukur sejauh mana pelayanan publik mampu merespons kebutuhan dan permintaan masyarakat dengan cepat dan tepat.
- h. **Inklusivitas:** Mengukur sejauh mana pelayanan publik dapat diakses dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
- i. **Keberlanjutan:** Mengukur sejauh mana kebijakan dan program pelayanan publik dapat berkelanjutan dan berdaya guna dalam jangka panjang.
- j. **Inovasi:** Mengukur sejauh mana pemerintah mampu berinovasi dalam merancang dan menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dan efektif.

Dengan mengukur keberhasilan penerapan New Public Service melalui dimensi-dimensi di atas, diharapkan pelayanan publik dapat bertransformasi menjadi lebih baik, lebih partisipatif, dan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kelebihan NPS sebagai berikut (1) membangun koalisi dan agensi public non-provit dan swasta (2) mengutamakan kepentingan masyarakat (3) berlandaskan demokrasi, kelemahan NPS sebagai berikut (1) NPS terlalu mensimplifikasikan peran pemerintah pada aspek pelayanan public (2) prinsip-prinsip NPS masih terlalu abstrak dan perlu dikonkritkan lagi.

e. Konsep Teori Organisasi

1. Konsep Organisasi

Budaya organisasi merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan dari definisi organisasi itu sendiri. Beberapa ahli seperti Stephen P. Robbins mengartikan organisasi sebagai entitas sosial yang dikordinasi secara sadar untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu, Waren B. Brown dan Dennis J. Moberg mendefinisikan organisasi sebagai entitas sosial yang relatif permanen, ditandai oleh perilaku berorientasi tujuan, spesialisasi, dan struktur.

Organisasi dapat dianggap sebagai living organisme, memiliki tubuh dan kepribadian. Seperti manusia, organisasi juga bisa mengalami kondisi baik dan buruk. Oleh karena itu, organisasi memiliki struktur budaya yang merupakan pola perilaku dan norma yang berlaku di dalamnya, dan diikuti oleh seluruh anggotanya.

Budaya organisasi ditentukan oleh cara semua orang bekerja, oleh nilai-nilai, norma, dan keyakinan mereka.. Istilah "budaya kerja" atau "budaya akademis" sering digunakan untuk menggambarkan budaya organisasi, terutama di dunia pendidikan.

Dengan pemahaman tentang budaya organisasi, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, di mana tujuan bersama dapat dicapai dan anggota organisasi dapat berkontribusi secara efektif. Budaya organisasi menjadi landasan penting dalam membentuk identitas dan karakteristik unik dari suatu organisasi.

2. Teori Budaya Organisasi

a. Pengertian Budaya Organisasi

Memang, budaya dan organisasi memiliki definisi yang berbeda, dan budaya organisasi juga memiliki definisi yang berbeda. Selama bertahun-tahun, budaya telah menjadi konsep penting dalam memahami masyarakat dan kelompok manusia..

Menurut Stoner et al. (1995), budaya dapat didefinisikan sebagai kompleks atau kumpulan asumsi tentang tindakan, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lainnya yang bekerja sama untuk menentukan makna bagi orang-orang di masyarakat tertentu..

Seperti yang dinyatakan oleh Krech dalam Graves (1986) dan Moeljono (2003), budaya adalah pola semua suasana, baik material maupun perilaku, yang telah digunakan oleh masyarakat secara tradisional sebagai cara untuk memecahkan masalah bagi anggota mereka. Budaya juga mencakup semua

cara yang terorganisir, kepercayaan, norma, nilai-nilai implisit, dan premis yang mendasari dan mengandung suatu perintah..

Dengan demikian, budaya organisasi dapat diartikan sebagai pola-pola perilaku, kepercayaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang terdapat dalam suatu organisasi. Budaya organisasi mencerminkan cara berpikir, berperilaku, dan menjalankan aktivitas di dalam organisasi tersebut. Budaya organisasi bisa menjadi faktor penentu kesuksesan dan kinerja organisasi karena membentuk identitas dan karakteristik unik dari organisasi tersebut.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Kast dan James E. Rosenzweig (2002), organisasi terdiri dari dua bagian besar, yaitu:

- 1) Subsistem Teknik: Merupakan bagian organisasi yang berfokus pada penggunaan pengetahuan, teknik, peralatan, dan fasilitas untuk mencapai tujuan organisasi. Subsistem ini berhubungan dengan aspek teknis dan operasional dari organisasi.
- 2) Subsistem Psikososial: Merupakan bagian organisasi yang berhubungan dengan aspek hubungan sosial antara individu-individu dalam organisasi. Subsistem ini mencakup interaksi antara anggota organisasi, komunikasi, kepemimpinan, dan aspek psikologis lainnya.

Kedua subsistem ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi. Subsistem teknik berkaitan dengan bagaimana tugas-tugas dan aktivitas dilaksanakan secara efisien, sedangkan subsistem psikososial berfokus pada bagaimana hubungan sosial dan dinamika kelompok mempengaruhi kinerja dan keberhasilan organisasi.

Dengan demikian, organisasi dipandang sebagai sistem yang kompleks dan terintegrasi, di mana unsur teknis dan hubungan sosial saling mendukung dan berkontribusi dalam mencapai tujuan Bersama.

a) Fungsi dan peran Budaya Organisasi

Budaya organisasi memainkan peran penting dalam membangun dan mengatur kembali sistem pengendalian manajemen organisasi, sehingga menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan komitmen manajer dan karyawan. Budaya organisasi juga memainkan peran penting dalam mengendalikan perilaku anggota organisasi dan memberikan berbagai fungsi dan manfaat bagi organisasi secara keseluruhan. Komitmen ini mendorong mereka untuk aktif terlibat dalam proses perencanaan strategis, pemrograman, anggaran, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan tindakan lain yang mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Robbins (1996) dan Ismail Nahwawi (2017) menyatakan bahwa budaya organisasi memiliki beberapa manfaat bagi organisasi, seperti berikut:

- Budaya organisasi membuat anggota organisasi merasa unik,
- Budaya organisasi memungkinkan pertumbuhan komitmen pada hal-hal yang lebih besar daripada kepentingan pribadi.
- Budaya organisasi membantu membuat organisasi lebih kuat sebagai organisasi.

b) Karakteristik budaya organisasi

Budaya organisasi merupakan suatu hal yang sangat kompleks dan memiliki beberapa karakteristik yang menjadi ciri khasnya. Karakteristik-

karakteristik ini sangat penting dalam penerapannya karena dapat mendukung pencapaian sasaran organisasi dengan lebih efektif.

Menurut Robbins (2002), terdapat beberapa karakteristik budaya organisasi yang perlu mendapatkan perhatian organisasi, antara lain:

- a. Inovasi dan Riset: Budaya organisasi yang inovatif dan mendukung riset dapat mendorong kreativitas dan pengembangan ide-ide baru dalam mencapai tujuan organisasi.
- b. Orientasi pada Kualitas: Budaya organisasi yang memiliki orientasi pada kualitas akan fokus pada peningkatan mutu produk atau layanan, sehingga memberikan kepuasan kepada pelanggan.
- c. Orientasi pada Tim: Budaya organisasi yang mendukung kerja tim dan kolaborasi antar anggota tim dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.
- d. Orientasi pada Pelanggan: Budaya organisasi yang berorientasi pada pelanggan akan memberikan perhatian yang tinggi terhadap kebutuhan dan kepuasan pelanggan.
- e. Orientasi pada Karyawan: Budaya organisasi yang menghargai dan menghormati karyawan akan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif.
- f. Orientasi pada Hasil: Budaya organisasi yang fokus pada pencapaian hasil akan mendorong kinerja yang lebih baik dan mencapai tujuan organisasi dengan efektif.

g. Orientasi pada Etika dan Nilai: Budaya organisasi yang berpegang pada etika dan nilai-nilai yang baik akan menciptakan integritas dan kepercayaan di antara anggota organisasi.

h. Orientasi pada Fleksibilitas dan Adaptasi: Budaya organisasi yang fleksibel dan adaptif akan dapat menghadapi perubahan dan tantangan dengan lebih baik.

Semua karakteristik tersebut dapat membentuk budaya organisasi yang kuat dan mendukung kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

c) Indikator-Indikator Budaya Organisasi

Menurut Robbins (2008), berikut adalah beberapa indikator budaya organisasi yang dapat diamati dan diidentifikasi:

a. Norma-norma dan Nilai-nilai: Norma-norma adalah aturan dan standar perilaku yang diharapkan dari anggota organisasi. Nilai-nilai adalah keyakinan dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi norma-norma tersebut. Indikator ini mencakup apa yang dianggap penting, benar, atau salah dalam organisasi.

b. Komunikasi: Bagaimana komunikasi dilakukan dalam organisasi, apakah ada hierarki yang kuat atau apakah komunikasi lebih terbuka dan partisipatif. Komunikasi yang efektif adalah ciri dari budaya organisasi yang sehat.

c. Sikap terhadap Perubahan: Bagaimana organisasi menangani perubahan, apakah mereka cenderung resisten atau terbuka terhadap

perubahan. Budaya organisasi yang adaptif akan mampu merespon perubahan dengan cepat dan fleksibel.

d. Keadilan dan Etika: Bagaimana organisasi memperlakukan anggotanya dan bagaimana keadilan dan etika dijunjung tinggi. Budaya organisasi yang adil dan beretika akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan harmonis.

e. Identitas Organisasi: Sejauh mana anggota organisasi merasa terhubung dan memiliki identitas dengan organisasi. Identitas organisasi yang kuat dapat meningkatkan rasa kebanggaan dan loyalitas dari anggota.

f. Fokus pada Kualitas dan Keunggulan: Bagaimana organisasi menekankan pada kualitas dan keunggulan dalam produk atau layanan yang mereka tawarkan. Budaya organisasi yang berfokus pada kualitas akan berusaha untuk terus meningkatkan kinerja dan kepuasan pelanggan.

g. Fleksibilitas dan Inovasi: Sejauh mana organisasi mendorong fleksibilitas dan inovasi dalam proses kerja dan pengembangan produk. Budaya organisasi yang inovatif akan menciptakan lingkungan yang mendukung ide-ide baru dan kreativitas.

h. Hubungan antar Anggota: Bagaimana hubungan antar anggota organisasi, apakah lebih bersifat kolaboratif atau kompetitif. Budaya organisasi yang kolaboratif akan menciptakan kerjasama dan dukungan antar anggota.

- i. Reward dan Pengakuan: Bagaimana organisasi memberikan reward dan pengakuan atas kinerja dan kontribusi anggotanya. Budaya organisasi yang memberikan penghargaan akan memotivasi anggota untuk berprestasi lebih baik.
- j. Kebebasan dan Otonomi: Sejauh mana organisasi memberikan kebebasan dan otonomi kepada anggotanya dalam mengekspresikan ide dan mengambil keputusan. Budaya organisasi yang memberi ruang otonomi akan menciptakan rasa tanggung jawab dan partisipasi dari anggota.

Indikator-indikator tersebut dapat membantu menggambarkan budaya organisasi dan bagaimana budaya tersebut mempengaruhi perilaku dan kinerja anggota organisasi.

Indikator budaya organisasi menurut Mackenna (2006:60) adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan antara manusia dengan manusia: Mengukur bagaimana para anggota organisasi merasa diterima dengan benar dan dihargai dalam lingkungan organisasi.
- b. Kerjasama: Mengukur tingkat kemampuan karyawan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan bersama.
- c. Penampilan karyawan: Mengukur kesan yang dibuat oleh karyawan terhadap orang lain, termasuk keserasian pakaiannya dan penampilan secara keseluruhan.

- d. Komitmen terhadap tujuan organisasi: Mengukur sejauh mana para karyawan memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi.
- e. Inovasi dan kreativitas: Mengukur sejauh mana organisasi mendorong inovasi dan kreativitas di antara karyawan untuk menciptakan solusi baru dan perbaikan.
- f. Keterbukaan dan transparansi: Mengukur tingkat keterbukaan dan transparansi dalam komunikasi dan pengambilan keputusan di dalam organisasi.
- g. Keadilan dan kesetaraan: Mengukur sejauh mana organisasi menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap semua karyawan.
- h. Orientasi pada pelanggan/masyarakat: Mengukur sejauh mana organisasi memiliki orientasi yang kuat pada kepuasan pelanggan atau masyarakat yang dilayani.
- i. Kepemimpinan yang efektif: Mengukur kualitas kepemimpinan dalam organisasi dan sejauh mana para pemimpin mampu menginspirasi dan membimbing karyawan.
- j. Lingkungan kerja yang kondusif: Mengukur tingkat kenyamanan dan keselamatan lingkungan kerja serta dukungan yang diberikan oleh organisasi untuk kesejahteraan karyawan.

f. Definisi Minat Beli

Menurut Durianto dalam Halim et al. (2019:417), "minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu, serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu. Minat beli merupakan pernyataan mental konsumen yang merefleksikan rencana pembelian suatu produk dengan merek tertentu. Pengetahuan tentang niat beli konsumen terhadap produk harus diketahui oleh para pemasar untuk mendeskripsikan perilaku kolaboratif.. Apabila keyakinan konsumen terhadap suatu produk menurun, maka minat beli konsumen cenderung menurun pula. Minat beli adalah suatu situasi di mana konsumen belum melakukan tindakan atau pembelian, namun menunjukkan keinginan untuk melakukan pembelian berdasarkan respon terhadap suatu produk atau objek tertentu. Minat beli ini menjadi indikator penting yang dapat digunakan untuk memprediksi perilaku atau tindakan pembelian oleh konsumen .(Halim, dkk (2019:41).

g. Faktor-Faktor Pembelian

Menurut Alma, Buchori (2018:101) faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian tersebut meliputi:

1. Social Factors, merujuk pada berbagai kelompok atau lingkungan sosial yang mempengaruhi individu, di mana seseorang menjadi anggotanya. Contohnya adalah keluarga, teman, tetangga, rekan kerja, klub olahraga, klub seni, dan lain sebagainya. Faktor sosial ini dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan individu dalam berbagai hal, termasuk dalam hal membeli produk atau jasa.

2. Faktor Budaya: Faktor budaya mewakili banyak kelompok, mulai dari kelompok negara hingga kelompok etnis atau suku, masing-masing memiliki budaya, adat istiadat, dan kebiasaan mereka sendiri. Di negara kita, budaya Sunda, Jawa, Minang, Batak, dll., memiliki gaya hidup dan barang kesenangan unik..
3. Personal Factors, mencakup berbagai aspek pribadi seseorang yang dapat memengaruhi keputusan pembelian. Beberapa aspek yang termasuk dalam faktor personal ini meliputi usia, pekerjaan, jabatan, kondisi ekonomi pribadi, gaya hidup, dan kepribadian. Setiap individu memiliki preferensi dan kebutuhan yang berbeda-beda berdasarkan faktor-faktor personal tersebut. Misalnya, usia seseorang dapat mempengaruhi preferensi dan kebutuhan konsumsi, sementara kondisi ekonomi pribadi akan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membeli produk atau jasa tertentu.
4. Psychological Factors, yaitu menyangkut motivasi seseorang untuk membeli apakah mengikuti teori motivasi Maslow atau karena dorongan lainnya. Juga menyangkut masalah persepsi seseorang terhadap sesuatu.

h. Indikator Minat Beli

Indikator minat beli menurut Alma, Buchori (2018:104) adalah sebagai berikut:

1. Need Recognition (Pengenalan Kebutuhan)

Kondisi dalam pengenalan kebutuhan tersier seseorang pada seseorang yang dimana merasakan stimulan atau rangsangan rasa untuk membeli suatu produk, yang kemudian stimulan atau rangsangan rasa dibagi mejadi dua macam yaitu

dari faktor internal seperti rasa ingin tahu terhadap suatu produk serta mengenali kebutuhan untuk menetapkan sendiri rasa keingin tahuannya dan dar faktor eksternal misalnya rasa ingin memberitahukan suatu produk tertentu.

2. Information Search (Pencarian Informasi)

Merupakan mencari sebuah informasi sebelum melakukan pembelian untuk mencari sebuah jalan agar memenuhi sebuah kebutuhan tersebut.

3. Evaluation of Alternatives (Pilihan Alternatif)

Proses untuk mempelajari segala sesuatu yang di dapat pada saat proses pencarian dan pengembangan beberapa pilihan. Konsumen biasanya evaluasi tergantung pada pilihan seseorang sesuai atau tidak dengan keinginan mereka, serta faktor lainnya berupa merek juga sangat menentukan alternatif dalam menentukan pilihan.

4. Purchase Decision (Keputusan Pembelian)

Merupakan keputusan membeli yang harus diambil berdasarkan informasi yang telah di terima.

5. Post purchase Behavior (Prilaku Pembeli)

Post purchase Behavior pengalaman konsumen yang dialami dalam mengkonsumsi produk yang dibeli. Apakah puas atau kecewa sesuai dengan jarak ekspektasi dengan kenyataan yang di hadapi.

i. Kualitas Produk

Produk dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen, menurut

Kotler dan Keller (2018:4). Ini dapat berupa barang fisik, jasa pengalaman, acara, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Kualitas produk, juga dikenal sebagai "kualitas produk", adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan berbagai fungsinya dengan baik, seperti keawetan, kehandalan, kemudahan penggunaan, dan meningkatkan akurasi, antara atribut lainnya.. (Purwanto *dalam* Hidayah, 2019:26).

j. Indikator Kualitas Produk

Menurut Kotler dan Keller (2019:5), terdapat sembilan faktor dimensi yang dapat diukur terhadap kualitas produk, yaitu:

- a. Kinerja (Performance): Kemampuan produk dalam melakukan fungsinya dengan efektif dan efisien.
- b. Fitur (Features): Karakteristik tambahan atau atribut dari produk yang membuatnya lebih menarik dan unggul dibandingkan produk sejenis.
- c. Keandalan (Reliability): Konsistensi dan kehandalan produk dalam memberikan performa yang sama dari waktu ke waktu.
- d. Daya tahan (Durability): Ketahanan dan masa pakai produk dalam kondisi normal penggunaan.
- e. Kehandalan (Conformance): Sejauh mana produk sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditentukan.
- f. Estetika (Aesthetics): Penampilan fisik produk dan bagaimana produk tersebut menarik perhatian konsumen.
- g. Kualitas layanan (Serviceability): Kemudahan dan kecepatan dalam perbaikan produk jika mengalami masalah atau kerusakan.

- h. Kualitas persepsi (Perceived Quality): Penilaian dan persepsi konsumen terhadap kualitas produk berdasarkan atribut dan citra produk.
- i. Kualitas nilai (Value for Money): Perbandingan antara kualitas produk dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen.

k. Pendapatan

Sukirno (2016:330) menyatakan bahwa "pendapatan merupakan kegiatan perusahaan di mana keuntungan ditentukan dengan mengurangi berbagai biaya dari hasil penjualan yang diperoleh.". Indikator keuntungan dapat di ukur dengan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan yang dikurangi oleh biaya yang dikeluarkan . Pengeluaran untuk bahan mentah, upah, bunga, dan sewa tanah adalah semua biaya dan keahlian kewirausahaan memperoleh keuntungan sedangkan indikator kerugian diukur dengan tingkat penjualan yang kurang, produk kurang menarik serta biaya produksi yang mahal". Sedangkan menurut chirstoper *dalam Suroto* (2017:37) "Menurut teori pendapatan, total penerimaan, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa dari pihak lain atau hasil industri dapat dihitung dengan nilai uang dari harta yang berlaku pada saat itu. Dengan kata lain, jumlah pendapatan yang diperoleh dari berbagai faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang sama dengan harga barang tersebut.. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut Sukirno (2016:330) "pendapatan adalah suatu hasil dalam perusahaan, yang hasil penjualannya adalah dari seluruh pendapatan.

a. Aspek-Aspek Pendapatan Dalam Produksi

Menurut Sukirno (2016:329) Aspek-Aspek pendapatan dalam produksi meliputi:

- a. Manfaat dari memahami penentuan harga faktor produksi
- b. Hubungan antara produktivitas dan permintaan faktor produksi
- c. Penentu-penentu permintaan faktor produksi
- d. Elastisitas permintaan faktor produksi.

l. Indikator Pendapatan

Menurut Sukirno, (2016:370) yang menjadi indikator pendapatann yaitu:

- a. Bunga

Pendapatan yang diperoleh dalam sebuah perusahaan Ketika menyimpan uangnya didalam bank atau Lembaga keuangan lainnya.

- b. Keuntungan

Ketika biaya, hutang, aliran pendapatan tambahan, dan biaya operasional dihitung, pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa yang terkait dengan operasi utama perusahaan ditambahkan ke total pendapatan..

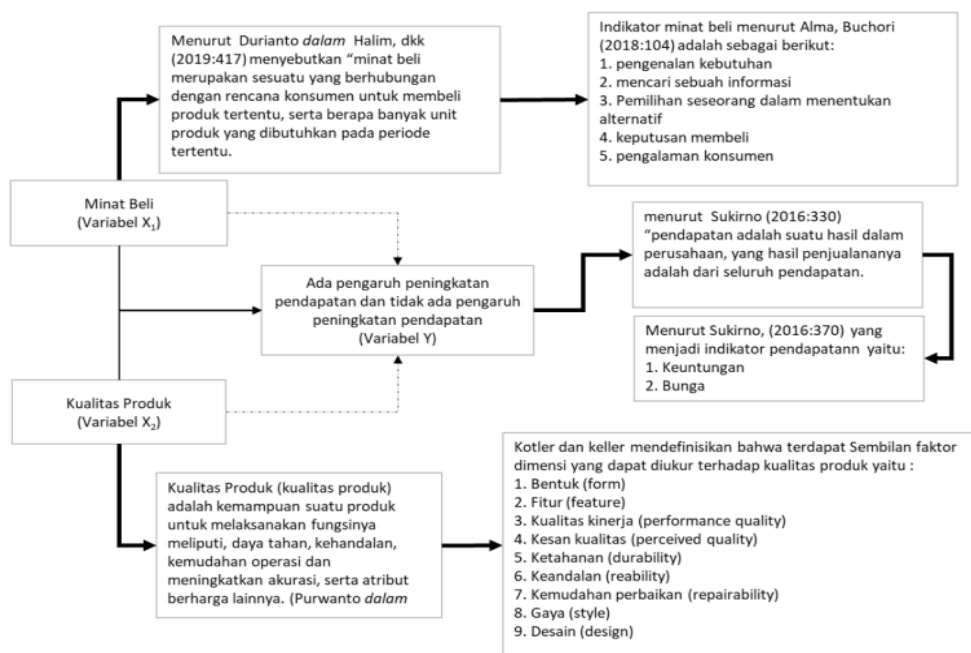
m. Hubungan Organisasi terhadap minat beli dan kualitas produk

Pendapat tentang hubungan antara organisasi dengan Minat beli dan Kualitas produk bahwa organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan pertumbuhan pendapatan. Organisasi mampu tumbuh dan berkembang dikarenakan didalam organisasi yang banyak factor yang mampu mendorong semangat kerja sumber daya manusia didalamnya serta membangun citra baik, sehingga berdampak pada minat beli terhadap kualitas

produk olahan rengginang ikan tengiri yang meningkat sehingga mengakibatkan peningkatan pendapatan .

C. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan hubungan antara variabel yang akan diteliti, menurut Uman Sekaran dalam Sugiyono (2016:60), "kerangka pemikiran merupakan model konsptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting." Oleh karena itu, secara teoritis, hubungan antara variabel berikut harus dijelaskan:



Gambar 1: Kerangka Konseptual
Sumber : Dibuat oleh Peneliti, 2023.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

Y adalah pendapatan (variabel dependen)

X1 adalah minat beli (variabel independen 1)

X2 adalah kualitas produk (variabel independen 2)

a adalah konstanta

(variabel b1, b2). Koefisien regresi adalah variabel independen.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang berasal dari kerangka pemikiran yang telah dibuat, menurut Sujarweni (2015:68). Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah prediksi atau jawaban teoritis telah terbukti atau didukung oleh data yang dikumpulkan dan dianalisis. Sebagai contoh, hipotesis penelitian dapat disusun sebagai berikut:

- a. Ada pengaruh minat beli terhadap peningkatan pendapatan olahan rengginang ikan tengiri pada UD. Barokah di Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo.
- b. Ada pengaruh kualitas produk UMKM terhadap peningkatan pendapatan olahan rengginang ikan tengiri pada UD. Barokah Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo.
- c. Ada pengaruh minat beli, dan kualitas produk terhadap peningkatan pendapatan olahan rengginang ikan tengiri pada UD. Barokah Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo.